



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARIF PUJI HARYONO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 64316

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.060.000.000

1. Tanah Seluas 233 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/104 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 198.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 49.738.500**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 53.320.544**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.361.059.044

**III. HUTANG** Rp. 413.348.400



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

947.710.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **11 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.